



## KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAH

**Qhori Anantama<sup>1)</sup>, Lukman Munawar Fauzi<sup>2)</sup>, Harky Ristala<sup>3)</sup>**

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian berjudul “Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi”. Masalah penelitian ini belum optimalnya suatu pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat rendahnya pengetahuan masyarakat dalam dokumentasi administrasi kependudukan, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelayanan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori komunikasi pemerintahan Seitz (dalam Ndraha 2001) yang di ukur melalui beberapa indikator komunikasi pemerintahan yaitu : kualitas komunikator, saluran media, respon masyarakat, informan meliputi dua informan Pegawai Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan tiga informan perwakilan masyarakat umum Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik Analisis Data melalui reduksi Data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi memiliki indikator yaitu, Kualitas Komunikator dapat dikategorikan sudah cukup baik menjadi wajah utama lembaga pemerintah dimata masyarakat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sopan jelas, dan responsif, Selain itu pengetahuan yang memadai tentang prosedur pelayanan juga menentukan keberhasilan komunikasi.

**Kata Kunci:** Komunikasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Disdukcapil, Kota Cimahi

### Abstract

*The research is entitled “Regional Government Communication in Population Administration Services in Cimahi City”. The problem of this research is that the implementation of population administration services to the public is not optimal due to the low level of public knowledge in population administration documentation, lack of human resources, and limited service time. The purpose of this study is to describe and analyze Regional Government Communication in Population Administration Services in Cimahi City. This research method uses descriptive with a qualitative approach, using Seitz's government communication theory (in Ndraha 2001) which is measured through several indicators of government communication, namely: the quality of communicators, media channels, public responses, informants including two*

informants from the Population and Civil Registry Office of Cimahi City and three informants representing the general public of Cimahi City. Data collection techniques through literature studies and field studies (observations and interviews). Data Analysis Techniques through Data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that local government communication in population administration services in Cimahi City has indicators, namely, the quality of the communicator can be categorized as good enough to be the main face of government institutions in the eyes of the public must have good communication skills, be polite, clear, and responsive, In addition, adequate knowledge of service procedures also determines the success of communication.

**Keywords:** Government Communication, Public Services, Civil Registration Office, Cimahi City.

## **PENDAHULUAN**

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi yang dilakukan seseorang yang berada dalam lingkup pemerintahan terhadap politik internal maupun eksternal. Pada dasarnya komunikasi adalah bentuk penyampaian pesan bagi manusia yang bersifat formal. Pemerintah mengkomunikasikan mulai dari regulasi sampai program pembangunan di Indonesia, dalam bentuk komunikasinya, pemerintah tidak hanya menyampaikan pesan tetapi apa yang dikomunikasikan kepada pemerintahan daerah harus sejalan dengan realisasi yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam proses komunikasi dapat memberikan sebuah informasi pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Istilah komunikasi yaitu pada istilah Bahasa Latin "*communis*" yang artinya kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar Bahasa Latin yaitu *communico* yaitu membagi. Istilah komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, sehingga bentuk pesan itu dipahami, yang melibatkan suatu individu dalam hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan membuat pesan dengan lingkungan satu sama lain.

Peranan komunikasi pemerintahan memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah khusus di sebuah wilayah, yaitu dalam upaya hubungan, ketika peran komunikasi yang baik, serta citra kepemimpinan pemerintahan dapat dipandang baik dari masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi alat pemerintah dalam mengevaluasi dan mempersuasi masyarakat dengan kaitannya citra kepemimpinan pemerintahan.

Di lain hal peran komunikasi pemerintahan bagi pemerintah sendiri yakni dalam kepemimpinan nya membentuk citra yang baik berdasarkan komunikasi serta kinerja dari pihak pemerintah, dalam upaya proses nya, ketetapan yang dimiliki pemerintah sebagai komunikator harus memiliki tiga unsur yaitu : keahlian, kepercayaan, dan daya tarik.

Pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan didirikan nya Negara Republik Indonesia , adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat tersebut mengandung makna Negara wajib memenuhi kebutuhan setiap warga Negara, Bentuk dari pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang kompeten dalam memenuhi kebutuhan utama dan hak sipil setiap warga negara nya atas dari jenis barang publik, jasa publik,dan pelayanan administratif,efektivitas suatu sistem pemerintahan di tentukan baik dan buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Kualitas dari komunikasi pemerintahan sangat penting untuk kesejahteraan manusia, pemerintah harus terlibat secara langsung dalam penyampaian informasi dan komunikasi, sebagaimana manusia perlu adanya komunikasi karena komunikasi yaitu merupakan suatu bentuk ungkapan dalam hubungan dan pada dasarnya, komunikasi dilakukan secara langsung atau verbal yang dapat di mengerti oleh semua belah pihak.

Pelayanan publik dalam memegang peranan vital bentuk penyelenggaraan administrasi kependudukan, sebagai jembatan pemerintah serta masyarakat, komunikasi yang efektif memastikan informasi mengenai layanan kependudukan tersampaikan dengan jelas, tepat, dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam pelayanan administrasi kependudukan mencakup pengelolaan data dan dokumen vital seperti Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga , akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya, komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat memastikan bahwa proses pengurusan dokumen berjalan lancar dan efisien.

Seorang pegawai pemerintahan untuk melayani komunikasi pun merupakan hal yang ideal menjadi bentuk perlu di perhatian agar masyarakat merasa nyaman, upaya pelayanan publik, sebab seorang

komunikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau pemerintahan harus memiliki ethos dan kemampuan serta komunikatif dalam menyampaikan semua informasi agar yang disampaikan dapat diterima langsung kepada masyarakat sehingga tidak terjadi adanya bentuk kesalahpahaman atau ketidakpuasan menerima pelayanan publik.

Adanya Permasalahan administrasi kependudukan yang terjadi di Jawa Barat, mendorong pemerintah Jawa Barat untuk melakukan komunikasi langsung dengan tepat agar mempermudah publik untuk mengakses informasi terkini terkait administrasi kependudukan, dalam hal ini Pemerintahan Jawa Barat harus menerapkan bentuk komunikasi yang tepat karena pemerintah Jawa Barat harus langsung berinteraksi dengan masyarakat yang dianggap mengetahui kebutuhan, keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat di Jawa Barat.

Hal ini menjadikan sebagai penghambat dalam bentuk pelaksanaan penyelesaian Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil yang Ada di Kota Cimahi secara benar, masyarakat diminta langsung ke kantor dinas untuk melengkapi persyaratan dari standar bentuk pelayanan, bahwa bentuk pelayanan komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa transmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau pun secara dengan kelompok, melalui sistem yang umum digunakan seperti pesan lisan dan tulisan serta melalui syarat lainnya.

Indikasinya adalah terdapat miskomunikasi pemerintah dinas administrasi kependudukan Kota Cimahi kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan, dimana minimnya literasi dari masyarakat Kota Cimahi secara langsung Dinas Kependudukan Administrasi Kota Cimahi sudah memberi wadah dalam bentuk sosialisasi mulai dari penyuluhan tingkat kelurahan, RT/RW, pembuatan Whats apps Grup, media sosial Instagram dalam hal untuk pembuatan KTP, Akte kelahiran dll.

Pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat Kota Cimahi bisa mengetahui secara langsung mengenai informasi yang di sampaikan oleh Dinas Administrasi Kependudukan Kota Cimahi agar supaya Komunikasi Pemerintahan dapat tercapai.

Dalam penerapannya, Seitz dalam Ndraha (2001) menekankan bahwa terdapat tiga dimensi penting menjadi ukuran keberhasilan Komunikasi Pemerintahan, yaitu : kualitas komunikator, saluran media, respon, Pertama kualitas komunikator menekankan perlunya dukungan informasi yang jelas secara merata dan menyeluruh. Kedua, saluran media berkaitan dengan mendukungnya fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan anggaran yang memadai agar layanan digital dapat berfungsi optimal. Ketiga, respon menitikberatkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, baik dalam hal kemudahan, efisiensi, maupun peningkatan kualitas layanan publik

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai salah satu cara dalam mengungkapkan dan menelaah suatu permasalahan dengan menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif yakni berupa tulisan dan lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala dan staf Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Cimahi, dan kepala bidang Media analisis Informasi kependudukan Disdukcapil Kota Cimahi, dan Masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara snowball, dimulai dari sejumlah informan awal, yang selanjutnya merekomendasikan informan lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, serta bersama dengan warga Kota Cimahi baik yang terlibat langsung

ataupun tidak langsung terkait dengan layanan publik. Wawancara dilakukan dengan interaksi secara langsung kepada informan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data seperti laporan dan dokumen resmi dari Disdukcapil Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

Pelayanan publik juga sering dilihat sebagai tolak ukur dari ekstensi birokrasi pemerintahan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang/ jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk menjelaskan komunikasi pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi, peneliti menggunakan beberapa dimensi tolak ukur, sebagaimana dijelaskan dalam teori ndraha dalam seitz. Dimensi tersebut mencakup yaitu Kualitas komunikator, Saluran media, Respon.

### **1. Kualitas komunikator**

Dimensi Kualitas Komunikator mencakup melihat dari pada bukti fisik langsung dilihat dan di rasakan dalam penyediaan pelayanan, dimensi ini mencakup sarana prasarana yang menjadi bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa, termasuk fasilitas tempat pelayanan, peralatan, perlengkapan, penampilan pegawai, dalam melayani pengguna pelayanan publik. Dimensi tersebut juga melibatkan aspek fisik seperti fasilitas, peralatan dan personil dalam menyampaikan sebuah informasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dipengaruhi oleh

bagaimana Dimensi kualitas komunikator ini dirasakan oleh mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya sebagai penyedia jasa, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam menyampaikan sebuah informasi termasuk dalam mendorong bentuk pelayanan yang baik khususnya pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.

terkait dengan Kualitas komunikator, peneliti melihat dari kelengkapan peralatan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yaitu pegawai Disdukcapil Kota Cimahi, bahwa kualitas komunikator dalam menyediakan fasilitas dan sebuah informasi sudah cukup lengkap dan memadai. Penggunaan informasi dari pegawai sudah baik dan telah diterapkan, penilaian dari beberapa informan sebagai perwakilan dari masyarakat dalam mendukung administrasi kependudukan data, penyampaian langsung cukup baik serta kenyamanan tempat pelayanan dinilai cukup.

## 2. Saluran Media

Dimensi Saluran Media hal ini mencakup dalam kemampuan unit pelayanan untuk memberikan layanan secara akurat, dengan cepat, dan tepat dan perangkat kerja operasional. Hal ini juga mencakup dalam kemampuan memberi informasi tepat waktu dan konsisten, dapat diartikan sebagai pelaksanaan pekerja yang benar dan sesuai prosedur yang sudah berlaku, saluran media juga mencakup pemenuhan layanan, tanggapan terhadap keluhan pelanggan, dan pemberian layanan secara wajar dan akurat. Keakuratan dan

ketepatan pegawai dalam melayani pengguna layanan sangat penting dari saluran media yang tersedia, karena ketidakcermatan dapat mempengaruhi penilaian kualitas layanan oleh pengguna.

Namun peneliti juga menemukan adanya keterbatasan pada perangkat keras seperti komputer yang digunakan seringkali mengalami penurunan performa saat mengoperasikan aplikasi beban tinggi. Beberapa perangkat masih merupakan hasil dari pengadaan tahun sebelumnya dan meskipun masih berfungsi, tapi masih sering mengalami kendala teknis seperti lemot atau buffering saat menjalankan saluran media. Kondisi fasilitas teknologi informasi masih tergolong minimalis karena keterbatasan anggaran yang harus dialokasikan untuk ke berbagai bidang lain, sehingga perlu pemeliharaan berkala agar tetap stabil dalam operasional. Perangkat teknologi informasi di Disdukcapil Kota Cimahi seperti laptop dan komputer sebagian besar merupakan perangkat lama, sedangkan pembaruan hanya dilakukan pada beberapa unit.

Kondisi ini menunjukkan meskipun ketersediaan perangkat sudah memadai untuk mendukung operasional, pemeliharaan rutin tetap dibutuhkan agar kinerja perangkat tetap optimal. Selain itu, pengelolaan server juga dilakukan mandiri oleh tim internal Disdukcapil Kota Cimahi, sedangkan koordinasi teknis serta rekomendasi standar keamanan saluran media sesuai dengan standar yang diberikan dalam layanan. Hal ini menunjukkan bahwa saluran media di Disdukcapil Kota Cimahi cukup baik untuk

mengoperasikan berbagai macam kanal media sosial, tetapi tetap membutuhkan penguatan di aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan anggaran.

### 3. Respon

Pada dimensi Respon yaitu mencakup sikap dalam merespon pemberi layanan administrasi dengan kemampuan suatu pelayanan untuk merespon keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan tepat serta menanggapi keluhan masyarakat, dimensi ini menekankan langsung perhatian dan dalam menangani suatu keluhan masyarakat agar untuk membangun hubungan yang baik, berkomunikasi secara efektif, dan memahami kebutuhan pengguna layanan, untuk memahami dan merespon keinginan kebutuhan masyarakat dalam menunjukkan sikap komunikasi dalam pelayanan. Dalam kata lain Dimensi Respon Masyarakat adalah bentuk usaha untuk mengetahui dan memahami keinginan serta kebutuhan pengguna layanan dan menghargai setiap pengguna yang membutuhkan pelayanan.

Bagi masyarakat, dengan adanya hal tersebut masuk dalam respon memberikan bentuk keluhan masyarakat kepada Pemerintah terkait bentuk pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal sehingga dengan adanya hal tersebut juga menjadikan bahan evaluasi dalam memperbaiki pelayanan yang lebih baik dan berkompeten sebagai penyedia layanan.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya profesionalitas pegawai harus mempunyai tanggung jawab penuh dalam memberikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, terkadang juga masyarakat masih belum memahami

secara penuh mengenai persyaratan yang harus dikumpulkan dan juga terkadang kinerja pegawai nya masih terbatas menjadikan hal ini pegawai Disdukcapil Kota Cimahi bekerja lebih keras terutama juga ketika pada saat mengunggah data dokumentasi respon pegawai lama dikarenakan lain nya ketersediaan teknologi dan jaringan terbatas dalam memberikan pelayanan meskipun sudah dibidang cukup baik dengan kekurangan yang ada, dapat dikatakan bahwa adanya dari Komunikasi Pemerintahan Daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi telah memberikan kemudahan meskipun dengan segala keterbatasan yang digunakan cukup baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Pemerintahan Daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi sudah cukup baik dan terlaksana dengan optimal, menunjukkan adanya kemajuan dalam pelayanan publik. Mulai dari kualitas komunikator adanya dukungan kualitas pegawai, respon, ketersediaan anggaran telah tersedia sehingga menjadi landasan kuat bagi pengembangan layanan publik, dari sisi saluran media bentuk sosialisasi yang diterapkan masih terbatas membuat sebagian masyarakat kota cimahi belum memahami dan memanfaatkan pelayanan yang ada, dengan dukungan infrastruktur media informasi sudah dibidang cukup baik dalam mengsosialisasikan namun masyarakat masih belum mampu memanfaatkan layanan secara online, selain itu terdapat kondisi Kendal teknis seperti *buffering* atau lemot, tetapi rendahnya literasi digital dan kebiasaan masyarakat yang masih mengadakan layanan belum semua memahami tentang syarat yang harus di bawa pada saat membutuhkan pelayanan publik. Dengan demikian, Komunikasi Pemerintahan Daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi sudah memenuhi harapan peningkatan kualitas pelayanan publik, namun perlu penguatan sosialisasi yang merata, peningkatan kapasitas aparatur, serta strategi adaptasi masyarakat agar tujuan komunikasi tersebut memberikan layanan benar-benar tercapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolph, R. (2016). *Tiga tahap Analisis*. 1–23.
- Alfaridzi, M. S. (2021). *Komunikasi Pemerintahan Kelurahan Pasteur Dalam Sosialisasi Program Kang Pisman Di Kota Bandung*. 1–23.

- Aprilia, I. A. (2022). Peran Komunikasi Pemerintah untuk mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik. *Communication*, 13(1), 70. <https://doi.org/10.36080/comm.v13i1.1576>
- Carito, T. A., Mangasing, N., & Baji, H. (2021). Contoh Wawancara. *Katalogis*, 9(1), 26–34.
- Farhan, R. L. (2019). *Representasi Rasisme Orang Kulit Hitam Dalam Film “Black Panther.”* 93–98.
- Fetni, F., & Fait, T. F. (2024). Komunikasi Organisasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Distrik Sentani Jayapura. *Journal Publicuho*, 7(2), 811–823. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.437>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Strategi Komunikasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City* (Vol. 3, Issue 2).
- Iswahyudi. (2017). Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 12(1), 25–30. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.53>
- Jasmine, K. (2014a). Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 10–68.
- Jasmine, K. (2014b). Metode Penelitian Kualitatif. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Jurusan, D., Komunikasi, I., Jaya, R., & Kampar, K. (2016). *Kulim Carbon Footprint Report 2012.pdf*. 27(2), 82–86.
- Kepustakaan, S., Kerangka, D., & Kepustakaan, P. A. S. (2003). *Studi Kepustakaan dan kerangka berfikir*. 11–39.
- Lukas, K., Pasoreh, Y., & Golung, A. M. (2020). Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam membangun Citra Kepemimpinan Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang-Mongondow. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 1–23.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27109>

- Reza, A. dan L. D. J. (2023). WORKSHEET : Jurnal Akuntansi WORKSHEET : Jurnal Akuntansi. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 27–37.
- Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantini, K. (2022). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Kinerja*, 18(4), 513–520. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9837>
- Sikka, K. (2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora ( AJSH ) Komunikasi Pelayanan Publik Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. 4(3).
- Sugiyono. (2019a). BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian. *Bab III Metoda Penelitian*, 17–26. [http://repository.upi.edu/59974/4/S\\_PEA\\_1600725\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/59974/4/S_PEA_1600725_Chapter3.pdf)
- Sugiyono. (2019b). Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Manajemen*, 13–20. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>
- Sugiyono. (2021). Quantitative, Qualitative and R & D Research Methods. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wijaya. (2018). Analisis Bentuk Lagu Sumpun Dayuong di Grup Randai Kuantan “Aliran Masa” Desah Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.